

The Nature and Object of the History of the Kasunanan Giri Kedaton: An Analysis of Political Stability in 1481-1605 AD

Ahmad Sirojuddin¹, Achmad Zuhdi, DH²
UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2}
✉022418250003@studentuinsa.ac.id

Abstract:

This study aims to reconstruct the political stability of Giri Kedaton by combining a philosophical examination of the nature and scope of historical research. The primary focus of this study lies in analysing the leadership of those bearing the title 'Sunan Giri', covering the periods of Raden Paku, Raden Ali Sumodiro, Pangeran Wiro Kesumo, and the golden age under Raden Fatikhal. Using critical historical methods, including heuristics, source verification, interpretation, and historiography. This study reveals that the internal stability maintained for over a century stemmed from the institutionalisation of dual legitimacy. The research findings indicate that although Giri Kedaton frequently faced external military threats (such as the Sengguruh attack and pressure from Islamic Mataram), the relatively conflict-free internal succession process demonstrated the robustness of the dual legitimisation institutionalised by the rulers of Giri. The scope of this study confirms that the pattern of symbolic leadership was a determining factor in the political resilience of Giri Kedaton amidst the dynamics of power transition in Java.

Keywords: *Giri Kedaton; Succession; Dual Legitimacy.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi stabilitas politik Giri Kedaton, dengan memadukan tinjauan filosofis pada hakikat dan batasan ruang lingkup objek penelitian sejarah. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisa puncak kepemimpinan penyandang gelar "Sunan Giri" yang meliputi periode Raden Paku, Raden Ali Sumodiro, Pangeran Wiro Kesumo, hingga masa keemasan dibawah Raden Fatikhal. Menggunakan metode sejarah kritis yang mencakup heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini mengungkap bahwa stabilitas internal yang terjaga selama lebih dari satu abad bersumber dari institusionalisasi legitimasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Giri Kedaton kerap menghadapi ancaman militer dari luar (seperti serangan Sengguruh dan tekanan Mataram Islam), proses suksesi internal yang berjalan relatif nirkonflik membuktikan kemampuan institusionalisasi legitimasi ganda yang dimiliki oleh para penguasa Giri. Ruang lingkup penelitian ini menegaskan bahwa pola kepemimpinan simbolis merupakan faktor determinan ketahanan politik Giri Kedaton di tengah dinamika transisi kekuasaan di Jawa.

Kata kunci: Giri Kedaton; Suksesi; Legitimasi Ganda.

PENDAHULUAN

Islamisasi yang berlangsung di Nusantara memasuki fase penting ketika para Walisongo, termasuk Sunan Giri, mengembangkan lembaga pendidikan agama di pesisir utara Jawa. Pada

akhir abad ke-15 M, tepatnya tahun 1481 M, Raden Paku yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri mendirikan Pesantren Giri di sebuah bukit di wilayah Kebomas, Gresik. Proses pendirian pesantren ini diawali dengan instruksi dari ayahnya, Maulana Ishak, ulama Pasai yang populer, yang memberikan segenggam tanah sebagai simbol dan petunjuk lokasi tempat pesantren harus dibangun. Didampingi dua abdi setianya, Syekh Grigis dan Syekh Koja, Raden Paku melakukan perjalanan mencari tanah yang sesuai dengan kriteria tersebut hingga akhirnya terletak di puncak bukit bernama Giri, sebuah topografi yang sarat makna spiritual dan geografis.¹

Pesantren Giri tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan spiritualitas, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial dan dakwah Islam yang melayani berbagai lapisan masyarakat dari rakyat biasa hingga kalangan elit bangsawan. Di bawah pengawasan langsung Sunan Giri, pesantren berkembang pesat dan menjadi magnet penyebaran ajaran Islam ke seluruh Nusantara, hingga ke wilayah timur seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Keunikan Pesantren Giri terletak pada keterbukaan dan jangkauan luasnya, yang membuatnya menjadi institusi pendidikan dan keagamaan terkemuka yang membina ulama serta kader dakwah yang akan turut memperkuat jaringan kekuasaan agama.²

Seiring dengan melambatnya hegemoni politik Majapahit di Jawa Timur, Pesantren Giri mulai mengambil peran yang lebih strategis dalam ranah politik. Tahun 1487 M menjadi tonggak penting ketika Sunan Giri menerima pengakuan sebagai pemimpin berdaulat dengan gelar Prabu Satmata, menandai transisi Pesantren Giri menjadi Kasunanan Giri Kedaton, sebuah kesultanan ulama dengan otoritas spiritual sekaligus politik.³ Transformasi ini didorong oleh situasi geopolitik saat itu, di mana segala pergeseran kekuasaan membuka peluang bagi lembaga yang mampu memadukan dakwah dan pengelolaan pemerintahan. Kasunanan Giri memperoleh status otonomi dari Majapahit yang melemah dan kemudian dikenal sebagai pusat legitimasi agama dan kekuasaan politik di pesisir utara Jawa.

Struktur pemerintahan yang mulai terbentuk mengintegrasikan fungsi-fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengkaderan ulama dengan perangkat pemerintahan yang

¹ Kris Adji AW et al., *Lagi Lagi Sang Gresik Bercerita Kisah-Kisah Kearifan Lokal Gresik Tempo Dulu* (Gresik: Yayasan Mata Seger, 2024), 42.

² Ainatun Nafisah, "Kepemimpinan Sunan Dalem Wetan di Giri Kedaton 1504-1545 M," *Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2024*, 21.

³ Ngabehi Kertapraja, *Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647*, disusun oleh W. L. Olthof, diterjemahkan oleh H. R. Sumarsono (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007), 20.

mengurus administrasi, pertahanan, dan perekonomian. Sunan Giri dan para penerusnya mampu menjaga kesinambungan kekuasaan dengan sistem suksesi yang memperhatikan aspek genealogis dan pengakuan spiritual, menghindari konflik internal yang seringkali melemahkan kerajaan lain pada masa tersebut.⁴ Kuatnya legitimasi ganda ini menjadikan Giri Kedaton memiliki pengaruh yang besar dan berkelanjutan, bahkan dianggap sebagai "Vatikan-nya Jawa" oleh sebagian sejarawan, tempat legitimasi kekuasaan bagi para penguasa Islam di Nusantara.

Peran pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan juga berfungsi sebagai basis dari kekuatan sosial-politik Kasunanan Giri Kedaton. Para santri dan ulama yang dididik tidak hanya menjadi pengajar agama, tetapi juga pelaku aktif dalam jaringan politik dan ekonomi yang diorganisasi oleh penguasa Giri. Giri Kedaton tampil bukan sekadar sebagai pemerintahan agama, tetapi sebagai kekuatan politik yang tangguh dan beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi di sekitarnya, khususnya melalui aktivitas ekonomi maritim di pelabuhan-pelabuhan penting Gresik dan Jortan.⁵

Keberhasilan Kasunanan Giri dalam mempertahankan stabilitas politik selama lebih dari satu setengah abad menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dan kekuasaan agama apabila disinergikan secara efektif dapat menjadi basis kekuatan politik yang sistematis. Stabilisasi politik yang terbangun atas fondasi legitimasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpadu menjadi bagian utama dalam keberlangsungan dan pengaruh Giri Kedaton di kancah politik regional hingga beberapa dekade awal abad ke-17.⁶

Meskipun telah banyak kajian yang membahas kekuasaan Giri Kedaton dari sudut pandang sejarah agama dan politik, kajian khusus terkait mekanisme dan faktor yang menjamin stabilitas politik internal di Kasunanan ini masih terbatas. Stabilitas politik yang dimiliki Giri Kedaton menjadi kunci bagi keberlanjutan pengaruhnya selama lebih dari satu abad, bahkan di tengah tantangan eksternal dan konflik regional yang kerap terjadi di Nusantara kala itu.⁷ Oleh karena itu, riset ini bertujuan menguraikan faktor-faktor, struktur sistem politik, dan peran kepemimpinan Sunan Giri dalam menjaga stabilitas politik, yang sekaligus memperkuat

⁴ Asmiah, "Islam dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2023), 37.

⁵ Septi Dwi Nur Aini, "Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Terbentuknya Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa," *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2023, 59.

⁶ Ahmad Sirojuddin, "Masa Kasunanan Giri Kedaton Tahun 1487-1605 M: Tinjauan Sejarah Politik," *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2025, 82.

⁷ Sabrina Wardatun Nisa', "Keruntuhan Kesultanan Giri Kedaton dan Dampaknya pada Abad ke-17 M," *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2025, 67.

legitimasi atas kekuasaan Giri Kedaton.

Dari Uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa point persoalan utama yang menjadi fokus penelitian lebih lanjut, antara lain (1) bagaimana peran Kasunanan Giri Kedaton dalam mengelola dan menjaga dinamika politik internal untuk mewujudkan stabilitas politik selama pemerintahannya, (2) bagaimana fungsi Kasunanan Giri Kedaton dalam memberikan legitimasi kekuasaan kepada para penguasa Islam serta pengaruhnya terhadap stabilitas politik regional, (3) bagaimana kontribusi Kasunanan Giri Kedaton sebagai mediator dan pengendali konflik antar kerajaan. Dengan mengulas rumusan masalah tersebut, pembaca diharapkan dapat memahami secara komprehensif mengenai stabilisasi politik yang dikembangkan oleh Kasunanan Giri Kedaton, serta peranannya dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan kekuasaan di Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah kritis yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) untuk menjangkau sumber-sumber tertulis, serta studi dokumentasi terhadap data visual material arkeologis situs Giri Kedaton untuk memperkuat analisis spasial-struktural. Sumber data sekunder diperoleh secara selektif dari babad, historiografi tradisional, artikel jurnal ilmiah, serta buku sejarah yang relevan dengan periodisasi kajian. Seluruh data yang terkumpul kemudian melewati tahapan kritik sumber (eksternal dan internal) untuk menguji keotentikan teks serta validitas informasi, sebelum akhirnya diinterpretasikan secara sistematis guna merekonstruksi narasi kronologis stabilitas politik Kasunanan Giri Kedaton periode 1481–1605 M.⁸

Kerangka analisis dalam penelitian ini mengombinasikan pendekatan historis-diakronis dan pendekatan politik. Pendekatan historis digunakan untuk mengawal alur kronologis transisi kekuasaan antar-generasi penguasa Giri. Sementara itu, pendekatan politik diaplikasikan guna membedah mekanisme konversi otoritas pesantren menjadi sebuah struktur kekuasaan kedaton yang berdaulat.⁹ Sebagai pisau analisis utama, Teori Hegemoni Antonio Gramsci digunakan untuk membongkar bagaimana strategi pertahanan wilayah dan kepatuhan masyarakat di bawah kepemimpinan para Sunan tidak digerakkan oleh instrumen kekerasan militer (*coercion*), melainkan melalui produksi konsensus moral dan ideologi keagamaan (*consent*).¹⁰ Melalui kerangka hegemoni kultural ini,

⁸ Nina Herlina, *Metodologi Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020), 29.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 89.

¹⁰ Thomas R. Bates, "Gramsci and the Theory of Hegemony," *Journal of the History of Ideas* 36, no. 2 (University of Pennsylvania Press, n.d.). Hlm 22.

operasionalisasi legitimasi ganda (spiritual-politik) yang dimainkan oleh figur Sunan Giri hingga Sunan Prapen dapat dinilai secara objektif sebagai variabel penentu langgengnya stabilitas politik internal Giri Kedaton.

HASIL PEMBAHASAN

PERAN DALAM DINAMIKA POLITIK INTERNAL

Perjalanan historis Giri Kedaton dalam mengelola dinamika politik internal guna menjaga stabilitas pemerintahannya dapat dipetakan secara kronologis ke dalam tiga fase kepemimpinan yang membentang dari tahun 1481 hingga 1605 M. Periodisasi ini bukan sekadar pembagian waktu mekanis, melainkan sebuah cerminan evolusi struktural dari sebuah institusi keagamaan tradisional menuju entitas politik kedaton yang mapan di pesisir utara Jawa. Sepanjang rentang waktu satu abad lebih tersebut, dinamika politik internal Giri dikawal oleh kepemimpinan karismatik para wali yang berhasil memadukan manajemen konflik berbasis moralitas Islam dengan kebutuhan taktis tata kelola wilayah. Melalui pendekatan kronologis ini, dapat diidentifikasi bagaimana konsensus internal dibangun secara bertahap, mulai dari fase peletakan dasar kedaulatan, penguatan birokrasi di tengah ancaman bersenjata, hingga pencapaian kematangan diplomasi. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap stabilitas politik Giri Kedaton secara jernih dapat ditelusuri melalui karakteristik unik dari masing-masing fase berikut.

A. Fase Peletakan Fondasi Otonomi dan Legitimasi Ganda

Peran pemimpin Kasunanan Giri Kedaton dalam mengelola dinamika politik internal sebagaimana utamanya terlihat dari sosok Sunan Giri adalah fondasi utama yang menjaga stabilitas pemerintahannya. Dari awal berdirinya Giri Kedaton pada tahun 1481 M, sistem kepemimpinan yang berbasis pada legitimasi ganda politik dan agama menciptakan hubungan harmonis antara penguasa, elite ulama, santri, dan masyarakat luas.¹¹ Sikap karismatik dan wibawa Sunan Giri sebagai pemimpin sekaligus ulama menempatkannya sebagai figur sentral yang mampu mengoordinasi seluruh elemen kekuasaan dengan efektif. Sistem suksesi yang mengedepankan warisan ilmu agama dan spiritualitas memperkecil peluang konflik internal yang kerap mengoyak kerajaan lain pada masa itu.¹²

Pengakuan penuh atas otonomi politik Giri Kedaton setelah melemahnya Majapahit di akhir abad ke-15 memperkuat posisi internal Giri sebagai pusat kekuasaan yang independen. Bebas dari tekanan

¹¹ Tomé Pires, *Suma Oriental: Buku primer sejarah dunia timur*, terj. A. Pramono (Jakarta: Ombak, 2014), 254.

¹² Ulum Fasih, "Sarana Islamisasi di Jawa Abad XV Menurut Babad Gresik," *Bathutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 2 (2022), 34.

kekuatan eksternal memberi ruang pengelolaan politik yang lebih terfokus, sekaligus pemeliharaan legitimasi yang kuat terhadap masyarakat maupun elite. Kondisi stabil ini menjadi katalisator pertumbuhan kekuatan keagamaan dan politik Giri di Nusantara. Sebagai pusat kekuasaan ulama-politik, Giri Kedaton menempuh strategi mengutamakan diplomasi internal dan mediasi konflik, sehingga konflik internal dapat dikelola secara efektif tanpa berujung pertumpahan darah. Stabilitas tidak hanya dihasilkan dari dominasi atau kekuatan fisik, tetapi juga konsensus moral dan sosial yang dibangun lewat legitimasi keagamaan. Kekuatan moral Sunan Giri menjadikan beliau bukan sekadar penguasa administratif, melainkan juga pengayom dan rujukan normatif bagi masyarakat dan elite lokal.¹³

Keberhasilan Sunan Giri mendirikan pemerintahan yang stabil diwujudkan lewat penataan perangkat pemerintahan yang progresif, seperti pelantikan Syekh Koja dan Syekh Grigis sebagai patih yang berperan sebagai administrasi sekaligus penasihat. Jejaring internal ini bukan hanya menjamin keberlangsungan sistem politik namun juga menghidupkan kehidupan sosial keagamaan yang saling mendukung legitimasi kekuasaan. Secara struktural, Giri Kedaton memiliki pembagian wilayah dan tugas-varis administratif yang cukup terperinci. Wilayah pemukiman elite, petugas administrasi, pesantren dan basis militer, semuanya dirancang sebagai bagian sistem politik yang terpadu. Toponomi seperti Dalem Wetan, Kepandeyan, dan Punggawan menunjukkan pembagian fungsi yang membantu pengendalian wilayah secara efisien. Ini memperlihatkan transisi Giri Kedaton dari pesantren menjadi pusat pemerintahan yang mendukung terciptanya stabilitas internal jangka panjang.¹⁴

B. Fase Pelembagaan Birokrasi dan Konsolidasi Internal

Pasca-wafatnya Sunan Giri I pada tahun 1506 M, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh para penerusnya, yakni Sunan Dalem (Sunan Giri II), Sunan Sedamargi (Sunan Giri III), hingga Sunan Prapen (Sunan Giri IV). Periode ini menjadi fase krusial bagi pelembagaan sistem kekuasaan internal. Sukses internal terjaga rapi karena para kader yang disiapkan cakap di bidang ilmu agama dan pemerintahan, membentuk pelaku kekuasaan yang mumpuni. Selama masa transmitter kepemimpinan dari Sunan Giri I menuju para penggantinya, tidak tercatat adanya krisis suksesi mematikan, yang menunjukkan sistem internal Giri cukup kokoh menghadapi konflik inheren pemerintahan.¹⁵

Terlepas dari ancaman eksternal, terutama serangan dari penguasa Majapahit dan kekuatan

¹³ Nur Wasi'a, "Simbol-Simbol Pada Makam Sunan Giri," *Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022*, 53.

¹⁴ Kris Adji AW, *Sejarah Bandar Grisee: Kisah-Kisah Situs Sejarah di Destinasi Wisata Bandar Grisee* (Gresik: Yayasan Mata Seger, 2022), 6.

¹⁵ Abdul Jaber Badjuber, "Sejarah Masuknya Da'wah Islam di Indonesia," *Jurnal Bina Umat* 4, no. 1 (2021), 27.

hilir yang merasa terancam oleh pertumbuhan kekuasaan Giri, kesatuan dan kesiapan internal memungkinkan Giri Kedaton bertahan dan mempertahankan otonominya. Perlawanan terhadap intervensi eksternal di masa Sunan Giri II dan perjuangan mempertahankan posisi politik membuka babak baru dalam tata politik internal.¹⁶ Konsolidasi kekuatan politik dan spiritual di dalam wilayahnya tetap dijaga sehingga tidak muncul konflik internal yang mengganggu. Intervensi para penerus Sunan Giri dalam dinamika politik internal adalah contoh unik perpaduan antara penguatan legitimasi spiritual dan tata pemerintahan yang efisien.

C. Fase Puncak Hegemoni Politik dan Diplomasi Regional

Memasuki tahun 1548 M, Giri Kedaton mencapai puncak kedewasaan politiknya di bawah kepemimpinan Sunan Prapen (Sunan Giri IV). Pada fase ini, stabilitas internal yang telah dipupuk sejak tahun 1481 M bertransformasi menjadi modal politik ekspansif yang diakui secara luas di Nusantara. Pola kepemimpinan yang mengedepankan harmoni internal, prinsip musyawarah, dan peran aktif ulama serta santri sebagai basis kekuasaan politik memberikan Giri Kedaton stabilitas dan daya tahan politik selama masa kejayaannya. Kekuatan moral Sunan Prapen menjadikan beliau rujukan normatif tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi elite politik lintas wilayah di Jawa maupun luar Jawa.

Sebagai poros penengah, posisi Giri Kedaton tetap tegak lurus mengawal independensinya. Peran diplomasi eksternal yang masif pada era Sunan Prapen didukung penuh oleh solidnya konsensus politik dalam pemerintahan Giri Kedaton yang nirkonflik. Keberhasilan menjaga harmoni birokrasi dan spiritual ini berlangsung konsisten hingga wafatnya Sunan Prapen pada tahun 1605 M. Meskipun di penghujung abad ke-16 mulai muncul riak-riak dari ekspansi kekuatan baru seperti Mataram Islam, tahun 1605 M secara resmi mengunci batas akhir kajian ini karena hilangnya figur karismatik Sunan Prapen menandai selesainya fase keemasan Giri Kedaton sebagai poros pengayom internal dan eksternal yang berdaulat penuh di Nusantara.

PERAN DALAM MEMBERIKAN LEGITIMASI PARA PENGUASA ISLAM

Kasunanan Giri Kedaton dikenal secara luas sebagai pusat legitimasi kekuasaan Islam di Nusantara, yang berperan penting dalam menegaskan kedaulatan dan otoritas para penguasa Islam lainnya. Legitimasi ini bersifat ganda, melibatkan aspek rohani dan politik—memberikan pengesahan yang diterima secara sosial maupun keagamaan. Para penguasa dari

¹⁶ J. A. B. Wiselius, *Babad Gresik (Transkripsi dan Terjemahan Teks Tradisional)* (Batavia: Landsdrukkerij, 1876), 491.

Demak, Pajang, hingga Mataram dan kerajaan-kerajaan di Maluku sering kali datang menimba ilmu sekaligus meminta restu dan legitimasi kepadanya. Proses ini membentuk jaringan hubungan kekuasaan yang kukuh dan menjadi salah satu pilar stabilitas politik regional.¹⁷

Legitimasi yang diberikan Sunan Giri tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi elemen substansial yang memperkuat supremasi kekuasaan penguasa lain. Misalnya, Sultan Pajang mendapatkan pengakuan resmi dari Giri Kedaton pada tahun 1586 M sebagai penguasa yang sah. Legitimasi ini datang dengan penguatan moral dan agama yang membuat kebijakan serta kepemimpinan lebih diterima dan efektif. Bahkan Mataram Islam, yang kemudian menjadi kekuatan dominan di Jawa, mengakui otoritas spiritual Giri Kedaton untuk mendapatkan restu kepemimpinan dan perluasan wilayahnya.¹⁸

Kontribusi Giri Kedaton juga muncul dalam praktek pengangkatan dan penerimaan status penguasa melalui proses ritual pengesahan yang memadukan agama dan politik. Para pemimpin Islam yang datang ke Giri bukan sekadar mengharapkan doa restu, tetapi juga legitimasi sosial political di mata rakyat dan elite, yang sangat penting dalam konteks pemerintahan feodal Nusantara.¹⁹ Posisi Sunan Giri sebagai ulama dan guru bagi para raja menempatkan institusi ini sebagai sumber kekuasaan moral yang mengikat.

Sistem legitimasi ini memiliki fungsi strategis dalam menjembatani konflik politik di antara berbagai kerajaan dan mencegah konflik horizontal yang bisa mengancam stabilitas kekuasaan Islam. Dengan memperoleh pengesahan rohani dari Giri Kedaton, penguasa lain bisa memantapkan posisinya tanpa terlibat dalam pertikaian berkepanjangan, sehingga kekuasaan mereka lebih stabil dan berkelanjutan.²⁰

legitimasi yang diberikan oleh Giri Kedaton memperkuat penyebaran dan dominasi nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan politik dan sosial di Nusantara. Giri Kedaton melalui santri dan ulama yang tersebar juga memperluas jaringan dan basis kekuasaan dengan menanamkan norma keagamaan yang menjadi alat legitimasi dan pengendalian sosial. Hal ini memungkinkan dominasi Islam dalam tatanan sosial-politik tanpa dominasi kekerasan, melainkan lewat konsensus agama dan budaya. Pengaruh Giri Kedaton terhadap legitimasi politik juga meluas hingga ke wilayah timur Nusantara seperti Maluku dan Kalimantan,

¹⁷ Mustakim et al., "Konstruksi Kepemimpinan Atas Tradisi Giri Kedaton Sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik," *Media Komunikasi FPIPS* 19, no. 1 (2020), 25.

¹⁸ Satria Avianda Nurcahyo, "Sejarah Toleransi Beragama Kerajaan Giri Kedaton," *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*, 2021, 68.

¹⁹ Pakubuwana V, et al., *Serat Centhini: Kamasutra orang Jawa*, terj. Daradjat dan Agus Wahyudi (Yogyakarta: Narasi, 2008), 11.

²⁰ Dukut Imam Widodo et al., *Grise Tempo Doeloe* (Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2014), 16.

dimana penguasa lokal menimba ilmu dan mendapatkan pengesahan dari pusat kekuasaan ini. Dengan demikian, Giri Kedaton bukan hanya pusat legitimasi politik Jawa, tetapi menjadi pusat pengaruh politik Islam regional yang handal dalam menjaga keutuhan pemerintahan dan stabilitas sosial luas.²¹

Dapat digarisbawahi disini, bahwa peran Giri Kedaton dalam pemberian legitimasi bukan hanya aspek ritual formalitas, tetapi sebuah institusi kunci dalam mekanisme kekuasaan yang efektif menawarkan stabilitas dan integrasi politik. Kombinasi antara kekuatan spiritual dan pengaruh sosial-politik memperkokoh jejaring kekuasaan yang memperluas supremasi dan keberlanjutan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

PERAN DALAM MEDIASI DAN PENGENDALI KONFLIK ANTAR KERAJAAN

Salah satu aspek penting dari pengaruh politik Kasunanan Giri Kedaton adalah perannya sebagai mediator dan pengendali konflik antar kerajaan di Nusantara. Dalam sejarahnya, Sunan Giri dan penerusnya sering tampil sebagai penengah dalam perselisihan yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka, sehingga mampu meredam ketegangan dan menjaga kestabilan politik regional. Fungsi ini diperkuat oleh legitimasi moral dan posisi strategis Giri sebagai pusat kekuasaan agama dan politik.²²

Salah satu kejadian terkenal adalah perlawanan Giri Kedaton terhadap serangan pasukan Majapahit yang ingin menghapus eksistensi Giri sebagai ancaman kekuasaannya. Resistensi dan keberhasilan Giri Kedaton menjaga kedaulatannya menjadi simbol keteguhan politik dan spiritual. Konflik ini menunjukkan kemampuan diplomasi dan militansi yang dikelola dengan baik oleh penguasa Giri, memperkuat kedudukan politiknya dan sekaligus menghindari terganggunya stabilitas internal.²³ Selain itu, Sunan Giri IV melakukan mediasi penting pasca pengukuhan Sultan Pajang, dengan melibatkan bupati-bupati di Jawa Timur. Dalam pertemuan ini, disepakati pengakuan atas Kesultanan Pajang, yang stabilisasi politiknya didukung oleh legitimasi Giri. Mediasi ini menghindarkan konflik berkepanjangan antara kekuatan lokal, memperkuat kohesi politik di wilayah Jawa bagian timur.

Dalam perseteruan antara Mataram dan Pangeran Surabaya, yang dapat berpotensi perang terbuka, Giri Kedaton dengan kepemimpinan Sunan Giri IV berhasil mencegah pertempuran

²¹ M. Mudlofar, *Babad Giri Kedaton Dinasti Giri Kedaton Dalam Islamisasi Di Pesisir Jawa* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 49.

²² K. Anam Suwandi Widji, *Giri Kedaton Kuasa Agama dan Politik* (Surabaya: Kalidaya, 2013), 75.

²³ Zainal Arifin, "Sunan Giri Konstruksi Elite Islam Terhadap Perubahan Sosial pada Masa Akhir Kekuasaan Majapahit Akhir Abad XV - Awal Abad XVI," Disertasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 147.

dengan memberikan pesan damai kepada kedua belah pihak. Keberhasilan ini menunjukkan peran penting Giri dalam menjaga perdamaian dan menghindari konflik besar. Strategi diplomasi ini memperlihatkan kedalaman kebijakan politik yang mengutamakan perdamaian melalui musyawarah dan nilai-nilai agama.²⁴ Mediasi dan pengendalian konflik oleh Giri Kedaton juga meluas ke wilayah Nusantara timur melalui jaringan dakwah dan pengaruh gubernur lokal yang pernah belajar di pesantren Giri. Ini mengokohkan pengaruh Giri sebagai pusat kekuasaan moral dan politik, dan mendukung stabilitas antar wilayah yang berbeda etnis dan budaya.²⁵

Namun, peran ini bukan tanpa tantangan. Perubahan dinamika politik dan munculnya kekuatan baru seperti Mataram Islam pada akhirnya mengurangi otonomi Giri Kedaton dan peran mediasi politiknya, menandai transisi era kepemimpinan yang lebih terbatas. Meski demikian, warisan pengaruh mediasi Giri Kedaton tetap menjadi contoh penting dalam pengelolaan konflik politik di Nusantara.²⁶ Fungsi mediasi dan pengendalian konflik dapat dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam mempertahankan stabilitas politik Giri Kedaton selama hampir dua abad. Peran ini menunjukkan bagaimana kekuatan politik berbasis legitimasi spiritual mampu mengelola konflik secara efektif tanpa dominasi kekerasan yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

stabilitas politik di Kasunanan Giri Kedaton sepanjang periode 1481–1605 M tidak ditopang oleh instrumen kekerasan militer (*coercion*), melainkan melalui keberhasilan para Sunan dalam memproduksi konsensus moral dan ideologi keagamaan (*consent*) yang melahirkan hegemoni kultural yang kuat. Dinamika tata kelola politik internal Giri Kedaton selama rentang waktu 124 tahun tersebut berevolusi melalui tiga fase kronologis yang saling berkesinambungan. Fase-fase tersebut mencerminkan bagaimana sebuah institusi keagamaan tradisional mampu bertransformasi secara bertahap menjadi sebuah entitas kedaton yang berdaulat, mapan, dan disegani di pesisir utara Jawa.

²⁴ Muhammad Firdiansyah Afandi, "Peranan Sunan Prapen di Giri Kedaton 1548-1605," Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022, 62.

²⁵ H.J. De Graff and T.H.G. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1983), 187.

²⁶ M. Ilham Wahyudi, "Sunan Giri Dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram Pada Babad Tanah Jawi," *Jumantara* 12, no. 2 (2021), 50.

evolusi kekuasaan Giri diawali oleh fase peletakan fondasi otonomi (1481–1506 M) di bawah Sunan Giri I yang berhasil melembagakan konsep "Legitimasi Ganda" (spiritual-politik) pasca-melemahnya Majapahit. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan pada fase pelebagaan birokrasi dan konsolidasi internal (1506–1548 M) oleh Sunan Dalem dan Sunan Sedamargi, di mana sistem suksesi internal terbukti stabil dan berbasis konsensus keluarga sehingga struktur politik Giri tetap tangguh bertahan meskipun menghadapi guncangan intervensi militer dari luar. Dinamika tersebut mencapai puncaknya pada fase puncak hegemoni politik dan diplomasi regional (1548–1605 M) di bawah kepemimpinan Sunan Prapen, yang memantapkan posisi Giri Kedaton sebagai poros penengah konflik trans-regional sekaligus pusat legitimasi religius bagi para penguasa di Nusantara.

Akhir dari periodisasi kajian ini secara ketat terkunci pada tahun 1605 M, karena wafatnya Sunan Prapen secara historis menandai selesainya era keemasan Giri Kedaton sebagai aktor mediasi independen yang berdaulat penuh. Kehilangan figur karismatik penengah ini menjadi titik balik penting yang mengubah peta perpolitikan pesisir utara Jawa. Setelah tahun 1605 M, posisi Giri Kedaton mulai bergeser masuk ke dalam fase defensif akibat gelombang ekspansi militer dan tekanan politik eksternal dari kekuatan baru, yaitu Kesultanan Mataram Islam, pada abad berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Anam, K., Widji, K. Anam Suwandi. *Giri Kedaton kuasa agama dan politik*. Surabaya: Kalidaya, 2013.
- Adji AW, Kris. *Sejarah Bandar Grisse: Kisah-kisah situs sejarah di destinasi wisata Bandar Grisse*. Gresik: Yayasan Mata Seger, 2022.
- _____. *Lagi lagi Sang Gresik bercerita kisah-kisah kearifan lokal Gresik tempo dulu*. Gresik: Yayasan Mata Seger, 2024.
- De Graff, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (1983). *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa: Kajian sejarah politik abad ke-15 dan ke-16*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1983.
- Herlina, Nina. *Metodologi sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020.
- Kuntowijoyo. *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Mudlofar, M. *Babad Giri Kedaton dinasti Giri Kedaton dalam Islamisasi di pesisir Jawa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Olthof, W. L. *Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647* (H. R. Sumarsono, Penerjemah). Yogyakarta: Narasi, 2007.
- Pakubuwana V, Yasadipura II, Ranggasutrasna, & Sastradipura. *Serat Centhini: Kamasutra orang Jawa* (Daradjat & A. Wahyudi, Penerj.). Sleman: Penerbit Narasi, 2008. (Karya asli diterbitkan 1814).
- Pires, Tomé. (2014). *Suma Oriental: Buku primer sejarah dunia timur* (A. Pramono,

Penerjemah). Jakarta: Penerbit Ombak, 2014.
Widodo, Dukut Imam., et al. *Grise tempo doeloe*. Pemerintah Kabupaten Gresik, 2014.
Wiselius, J. A. B. *Babad Gresik* (Transkripsi dan Terjemahan Teks Tradisional). Batavia: Landsdrukkerij, 1876.

ARTIKEL JURNAL

- Afandi, Muhammad Firdiansyah. "Peranan Sunan Prapen di Giri Kedaton 1548-1605", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.
- Aini, Septi Dwi Nur. "Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Terbentuknya Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.
- Arifin, Zainal. (2020). "Sunan Giri konstrukt elite Islam terhadap perubahan sosial pada masa akhir kekuasaan Majapahit akhir abad XV - awal abad XVI", Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Asmiah. "Islam dan struktur pemerintahan Kesultanan Ternate". *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2). 2023.
- Badjuber, Abdul Jaber. "Sejarah masuknya da'wah Islam di Indonesia". *Jurnal Bina Umat*, 4(1). 2021.
- Bates, Thomas R. "Gramsci and the theory of hegemony". *Journal of the History of Ideas*, 36(2). 1975.
- Fasih, Ulum. "Sarana Islamisasi di Jawa abad XV menurut Babad Gresik". *Bathutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 1(2). 2022.
- Mustakim, et al. "Konstruksi kepemimpinan atas tradisi Giri Kedaton sebagai identitas sosial budaya masyarakat Kabupaten Gresik". *Media Komunikasi FPIPS*, 19(1). 2020.
- Nafisah, Ainatun. "Kepemimpinan Sunan Dalem Wetan di Giri Kedaton 1504-1545 M". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Nisa', Sabrina Wardatun. "Keruntuhan Kesultanan Giri Kedaton dan dampaknya pada abad ke-17 M". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Nurchahyo, Satria Avianda. "Sejarah toleransi beragama Kerajaan Giri Kedaton". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Sirojuddin, Ahmad. "Masa Kasunanan Giri Kedaton Tahun 1487-1605 M: Tinjauan sejarah politik", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- Wahyudi, M. Ilham. "Sunan Giri dalam legitimasi kekuasaan Mataram pada Babad Tanah Jawi". *Jumantara*, 12(2). 2021.
- Wasi'a, Nur. "Simbol-simbol pada makam Sunan Giri". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.